

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENYELESAIAN
HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA
SENGKANG KELAS I B**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**HASMANIAR. H
NIM. 10100113040**

Pembimbing 1 : Dr. H. Supardin, M.HI.

Pembimbing 2 : Dr. Hj. Patimah, M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasmaniar. H
NIM : 10100113040
Tempat/Tgl. Lahir : Keera, 2 April 1994
Jurusan : Peradilan
Prodi : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Samata
Judul : Analisis Putusan Hakim tentang Penyelesaian Hak Asuh Anak akibat Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya senndiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 3 April 2017

Penyusun,

HASMANIAR. H

NIM:10100113040

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENYELESAIAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS I B", yang disusun oleh Hasmaniar. H, NIM: 10100113040, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 27 April 2017 M
30 Rajab 1438 H

DEWAN PENGUJI:

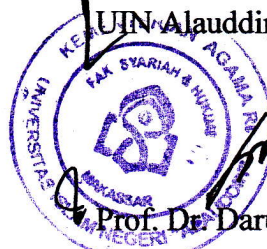
Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.
Munaqisy I : Dra. Hj. Hartini, M.H.I.
Munaqisy II : A. Intan Cahyani, M.Ag.
Pembimbing I : Dr. H. Supardin, M.H.I.
Pembimbing II : Dr. Hj. Patimah, M.Ag.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

NIP. 196210161990031003

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي انعم علينا بنعمة الايمان والاسلام, الصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Putusan Hakim tentang Penyelesaian Hak Asuh Anak akibat Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B”. Shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad Saw yang telah membawa ummat islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, baik itu secara moril maupun secara materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun merasa perlu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Bapak tercinta Hasim selalu mendoakan dan mendukung pendidikan penyusun hingga akhirnya sampai di titik ini dan Ibu tercinta Hj. Indo Mare yang selalu mendoakan.
2. Prof. Dr.H. Musafir Pababbari, M.Si., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Dr. H. Supardin, M.H.I., Selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Dr. Hj. Fatimah, M.Ag., Selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

6. Dr. H. Supardin, M.H.I., Selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan masukan dan saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
7. Dr. Hj. Fatimah, M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan kritik yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
8. Dra. Hj. Hartini Thahir, M.HI. Selaku Dosen Munaqisy 1 yang telah memberikan kritik dan saran demi menyempurnakan skripsi ini.
9. Drs. Hadi Daeng Mapuna, M. Ag. Selaku Dosen Munaqisy II yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
10. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Peradilan Agama yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat memperoleh gelar sarjana.
11. Staf jurusan Peradilan Agama, Kak Sri yang telah banyak membantu penyusun selama penyusun menyelesaikan kuliah di UIN Alauddin Makassar.
12. Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Sengkang yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sengkang.
13. Dra. Hj. Hasmiati D, M.H., Selaku Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan mengenai penelitian yang kami laksanakan.
14. Drs. Muh.Arsyad.S.Ag., Selaku Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan mengenai penelitian yang kami laksanakan.
15. Terima kasih kepada Mukisthi sahabatku yang senantiasa menemaniku dalam suka maupun duka dalam proses perkuliahanku ini.
16. Seluruh teman serumahku yakni nani, bibi dan tenri yang selalu menemaniku.

17. Seluruh teman-teman di jurusan Peradilan Agama terkhusus kepada angkatan 2013 kelas A yang telah memberikan banyak kesan selama penyusun menempuh proses perkuliahan di UIN Alauddin Makassar.
18. Kepada kakakku Jusmawan yang selalu memberikan masukan serta motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini.
19. Kepada kakakku Mardiani yang selalu mendoakanku selama ini.
20. Kepada seluruh keluargaku yang selalu mendoakanku.

Samata, 21 Maret 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan dan Kegunaan.....	12
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	14
A. Tinjauan Umum terhadap Perceraian	14
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Lokasi dan Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Pengumpulan Data	47

D.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		52
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B	52
B.	Deskripsi Perkara	56
C.	Proses Penyelesaian Hak Asuh Anak akibat Perceraian dari Hasil Putusan Hakim	63
D.	Penanganan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perebutan Hak Asuh Anak	64
BAB V PENUTUP		73
A.	Kesimpulan	73
B.	Implikasi Penelitian	74
DAFTAR PUSTAKA		76
LAMPIRAN.....		75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		76

PEDOMAN TRANSLITERASI

Adapaun pedoman transliterasi yang dipakai oleh penulis adalah sebagai berikut:

Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet(dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrop terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	em
ن	nun	n	En
و	wau	w	we
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	,	apostrop
ي	ya	y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(‘).

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	a	a
	<i>Kasrah</i>	i	i
	<i>Dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan ya	ai	a dan i
	Fathah dan wau	au	a dan u

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

	<i>Fathah dan alif</i> <i>atau ya</i>	a	a dan garis di atas
	<i>Kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
	<i>Dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

2. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

2. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(i).

3. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

4. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

5. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

6. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf lihi* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

7. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Nama : HASMANIAR H

NIM : 10100113040

Judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENYELESAIAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS I B

Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu Bagaimana Analisis tentang Putusan Hakim Mengenai Hak Asuh Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B. Selanjutnya ada beberapa sub masalah yang diangkat sebagai berikut: 1. Bagaimana proses penyelesaian hak asuh anak akibat perceraian dari hasil putusan hakim di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B?, Serta Bagaimana penanganan hakim dalam menyelesaikan sengketa perebutan hak asuh anak di Pengadilan Agama Sengkang kelas I B?

Jenis penelitian ini tergolong penelitian field research kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah: teologis-normatif, dan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dalam permasalahan menyelesaikan perkara perebutan hak asuh anak, di Pengadilan Agama Sengkang. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan penelusuran referensi. Lalu teknik pengolahan data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis dalam putusan hakim mengenai hak asuh anak adalah bahwa tepat atau tidaknya suatu pertimbangan hakim itu kembali pada asas dibuatnya putusan. Putusan yang baik harus memuat alasan dan dasar putusan. Artinya itu putusan harus di buat secara sistematis dalam bentuk pertimbangan yang harus di pertanggungjawabkan secara hukum. Maka dari itu, pertimbangan hakim tersebut, harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dapat dijadikan dasar mengadili.

Implikasi dari penelitian ini adalah 1. Hakim Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B dalam memeriksa perkara permohonan hak asuh anak (hadhanah) harus selalu menjaga keadilan. 2. Hakim juga harus selalu tetap teliti dalam memutuskan perkara mengenai hak asuh anak. 3. Pembuktian merupakan sarana untuk menemukan kebenaran. Dalam memeriksa bukti harus ada ketelitian hakim, oleh karena itu perlu adanya sikap yangbijak dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berkaitan mengenai sengketa hak asuh anak (hadhanah).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diridai oleh Allah swt. Dari pengertian itu dapat diketahui bahwasanya untuk menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia, kemudian menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, membangun rumah tangga yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Pernikahan dapat menjaga kehormatan diri dan pasangan agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala QS al-Zāriyāt/51:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.¹

Penjelasan dari ayat tersebut adalah semua makhluk itu diciptakan berpasang-pasangan, bumi dan langit, malam dan siang hari, matahari dan rembulan, daratan dan lautan, terang dan gelap, iman dan kafir, mati dan hidup, celaka dan bahagia, serta surga dan neraka, hingga semua makhluk hidup dan tumbuhan pun demikian pula.

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2002), h. 550.

Dalam hal perkawinan, perkawinan sah menurut Pasal 2 Undang-undang Perkawinan tahun 1974, yang juga diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan sebagai berikut:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Dalam hal ini seperti yang kita ketahui setelah adanya penyatuan cinta dalam hubungan suami dan istri dalam sebuah ikatan pernikahan maka ada pula perceraian. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka.³

Faktor penyebab perceraian antara lain adalah sebagai berikut ketidakharmonisan dalam rumah tangga alasan tersebut adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail. Kemudian krisis moral dan akhlak, Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misalnya, mabuk, berzinah, terlibat tindak kriminal utang piutang, bahkan perzinahan. Di samping itu,

²Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000), h. 135.

³Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), h. 117.

masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri. Dan yang paling sering terjadi didaerah bugis itu Pernikahan tanpa cinta karena alasan utama dijodohkan oleh orangtua. Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.⁴

Adanya masalah-masalah dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekcoakan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami istri. Langkah pertama dalam menanggulangi sebuah masalah perkawinan adalah: Adanya keterbukaan antara suami-istri, berusaha untuk menghargai pasangan, jika dalam keluarga ada masalah, sebaiknya diselesaikan secara baik-baik, saling menyayangi antara pasangan.

Akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah : Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan

⁴Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), h. 98.

anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.⁵

Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang Perkawinan maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.

Ketentuan di atas juga menegaskan bahwa negara melalui undang-undang perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak-anak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian. Permohonan untuk mendapatkan hak asuh perlu dicermati bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a, UU Perkawinan pada bagian terakhir menyatakan bahwa "bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya." Berangkat dari ketentuan tersebut maka dalam suatu gugatan perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena

⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Gama Press, 2010), h. 2.

perceraian, maka salah satu pihak juga dapat memohonkan agar diberikan hak asuh atas anak-anak (yang masih dibawah umur) yang lahir dari perkawinan tersebut.⁶

Dalam undang-undang perkawinan sendiri memang tidak terdapat definisi mengenai hak asuh tersebut, namun jika kita melihat Pasal 1 angka 11, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), terdapat istilah "Kuasa Asuh" yaitu "kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Selain itu juga dalam Pasal 1 angka 10, Undang-undang Perlindungan Anak terdapat pula istilah "Anak Asuh" yaitu: Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orantuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.⁷

Seluk beluk pemberian hak asuh anak sesuai dengan apa yang kami sampaikan di atas tentunya akan timbul suatu pertanyaan, siapakah diantara bapak atau ibu yang paling berhak untuk memperoleh hak asuh atas anak tersebut ? Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak

⁶Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Tim Permata Press, 2003), h. 90.

⁷Republik Indonesia, *Perlindungan Anak dan Pengadilan Anak* (Jakarta: Trinity, 2007), h. 3.

pemeliharaan, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Ketentuan KHI diatas nampaknya tidak dapat berlaku secara universal, karena hanya akan mengikat bagi mereka yang memeluk agama Islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama).⁸

Sedangkan untuk orang-orang yang bukan beragama Islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri), karena tidak ada pedoman yang secara tegas mengatur batasan pemberian hak asuh bagi pihak yang menginginkannya, maka hakim dalam menjatuhkan putusannya akan mempertimbangkan antara lain pertama, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kedua, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari pihak yang memohonkan hak asuh anak tersebut dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak tersebut. Dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (2) disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal itu mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak yang apabila sengketa itu tidak diputus di pengadilan, akan menjadi berlarut-larut, sehingga muaranya anak menjadi korban. Banyak sekali setelah proses perceraian seseorang tidak mempersoalkan hak asuh anak karena keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak bersama-

⁸Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 177.

sama. Tapi bagaimana jika muncul sengketa perebutan hak asuh anak yang terjadi terus-menerus yang merugikan masa depan anak? Haruskah anak tersebut dipenggal dan dibagi dua? Ataukah anak berlalu lalang membagi hari kunjung hanya untuk memenuhi egoisme ayah dan ibunya? Di sinilah pengadilan harus menimbang siapa yang paling cakap memelihara anak, tanpa membatasi kasih sayang keduanya sebagai orang tua.⁹

Penguasaan secara hukum atas anak oleh salah satu pihak, bukan berarti menghalangi atau memutus hubungan dengan pihak lain itu bertentangan dengan hukum Islam. Ini semacam ijtihad hakim supaya kedua belah pihak berhenti bertikai dan perkembangan mental anak tidak terganggu. Dalam kaidah *fiqhiyyah* disebutkan bahwa menghindari kerusakan (mental anak) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Maknanya, penguasaan tunggal atas anak oleh salah satu pihak bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban pertikaian. Anak harus diberikan kepastian hukum (*rechtzekerheid*) oleh siapa dia diasuh supaya tidak seperti barang dagangan yang diperebutkan.¹⁰

Setelah diuraikan diatas tentang sengketa hak asuh yang sering terjadi konflik antara suami dan istri setelah bercerai maka dari itu, penulis mengungkapkan hal sebagaimana telah terjadinya sengketa hak asuh di Pengadilan Agama Sengkang. Dengan demikian, setelah dijatuhkannya putusan hakim bahwa hak asuh anak jatuh ditangan ibu, namun dalam hal ini anak tergolong dibawah umur dan kedua orang tua sama-sama berkeras ingin menguasai anak. Meskipun dalam Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁹Zul Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h. 73.

¹⁰Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 126.

disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun hakim dapat melakukan diskresi bahwa tidak selamanya seorang ibu menjadi pemegang hak asuh terhadap anak. Jika dalam fakta persidangan terungkap bahwa si ibu adalah seorang pemabuk, penjudi, suka memukul, kerap menelantarkan anak atau tidak cakap untuk memelihara anak, bisa saja hak asuh diserahkan ke pihak ayah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik dalam memilih judul : Analisis Putusan Hakim tentang Penyelesaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1 B.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian hak asuh anak akibat perceraian dari hasil putusan hakim di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B?
2. Bagaimana penanganan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perebutan hak asuh anak di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B?
3. Bagaimana Analisis tentang Putusan Hakim Mengenai Hak Asuh Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yakni:

Analisis putusan hakim tentang penyelesaian hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Sengkang kelas 1B.

- 1) Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara, dan sebagainya).

2) Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan hakim di sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum.¹¹

3) Hak Asuh Anak

Menurut Sayid Sabiq bahwa hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar belum *mumayyiz* tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹²

4) Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.¹³

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B kabupaten Wajo dan berdasarkan deksripsi fokus penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa

¹¹Andi Lasmana “Definisi Anak” [http://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/\(26November2015\).](http://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/(26November2015).)

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 8* (Bandung: Al-Ma’ruf, 1984), h. 179.

¹³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 12.

fokus penelitian ini berfokus pada Analisis putusan hakim tentang penyelesaian hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Sengkang kelas 1 B.

D. Kajian Pustaka

Peneliti menemukan buku dan berbagai karya ilmiah yang berkaitan dan menjadi pedoman penelitian yaitu:

Buku, Adib Bahari yang berjudul *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono-gini + Hak Asuh Anak*, buku ini diterbitkan pada bulan September 2012 yang menjelaskan tentang proses pengajuan gugatan perceraian di pengadilan agama, kemudian menjelaskan tentang tuntutan prosedural yang harus dilakukan manakala seseorang akan bercerai, dan pembagian harta gono-gini setelah bercerai namun dalam buku tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang penyelesaian hak asuh anak seperti judul yang akan diteliti oleh peneliti.

Dalam buku Satria Efendi, yang berjudul *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, buku ini diterbitkan pada tahun 2005 yang mana dalam bukunya hanya membahas tentang perkara hukum keluarga serta penjelasan hak hadhanah akibat perceraian. Hak anak setelah perceraian yaitu berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya apabila hak asuh jatuh ketangan ibunya. Dan anak dibawah umur 12 tahun yang belum *mumayyiz* berhak di asuh oleh ibunya kecuali ibu dalam keadaan tidak waras.

Hakim Rahmat dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam* yang menjelaskan tentang pengertian Hadhanah. dalam buku tersebut yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq bahwa hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar belum *mumayyiz* tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya. Dalam buku tersebut hanya menjelaskan tentang pengertian

hadhanah maka dari itu peneliti membutuhkan banyak referensi untuk melengkapi penulisan ini.

Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya :

Pertama, Lukman Hakim, Skripsi dengan judul “ Kajian Yuridis tentang Hak Asuh Anak (Hadlonah) dibawah umur setelah adanya perceraian, skripsi ini dibuat pada tahun 2008, yang menjelaskan tentang permasalahan kedua belah pihak akibat perceraian untuk memperebutkan hak asuh anak dibawah umur setelah putusnya perkara yang menyebutkan bahwa hak asuh jatuh ketangan ibunya namun, anak memilih untuk diasuh oleh ayahnya. Letak perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan di kaji oleh peneliti yaitu skripsi tersebut tidak menjelaskan tentang rentetan penyelesaian hak asuh anak.

Kedua, Skripsi dari Rurin Tiopani Tambun yang berjudul “Hak Asuh Anak dibawah Umur Akibat Perceraian Orangtua”.skripsi ini dibuat pada tahun 2011, dalam skripsinya tersebut menjelaskan tentang pertimbangan seorang hakim dalam memberikan hak asuh dan tanggung jawab kepada ayah, karena pada kenyataan yang sering terjadi hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada ibu sampai anak tersebut dewasa dan memilih sendiri apakah ia akan ikut dengan ibunya atau dengan ayahnya, serta apa pertimbangan hakim menetapkan sang ayah yang berhak mengasuh anak tersebut, dan apakah putusan yang telah diberikan oleh hakim dapat dibatalkan dan hak asuh terhadap anak tersebut dikembalikan kepada ibunya. Letak ketidaksamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu skripsi ini hanya berfokus terhadap pertimbangan hakim sementara penulis berfokus pada penyelesaian dari perkara hak asuh anak tersebut

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka dalam Penulisan Skripsi ini tujuan yang akan diraih antara lain :

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian hak asuh anak akibat perceraian dari hasil putusan hakim.
- b. Untuk mengetahui penanganan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perebutan hak asuh anak.
- c. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi hakim dalam menyelesaikan perkara dari perceraian hak asuh anak.
- d. Untuk mengetahui analisis tentang Putusan Hakim Mengenai Hak Asuh Anak di Bawah Umur.

2. Kegunaan

1) Kegunaan ilmiah

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan hukum Islam, agar dapat mengerti dan memahami serta memperoleh gambaran yang nyata mengenai akibat hukum hak asuh anak akibat perceraian.
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang akibat hukum hak asuh anak yang disebabkan oleh perceraian.

2) Kegunaan Praktis

- a. Peneliti berharap agar penulisan ini dapat memberikan informasi baru yang bermanfaat kepada masyarakat luas terkait dengan masalah penyelesaian hak asuh anak akibat perceraian.

- b. Dapat memberikan sumbangan pikiran atas masukan para aparatur pemerintah yang disebabkan oleh akibat hukum hak asuh anak.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum terhadap Perceraian

Pengertian perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.

1) Definisi Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya satu macam, tetapi berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai golongan warga negara dan untuk berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) berlaku pada tahun 1926 yang telah membagi golongan penduduk Indonesia menjadi tiga golongan, yaitu: golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Indonesia Asli (Bumiputera).¹⁴

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun

¹⁴Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1981), h. 15.

dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.¹⁵

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, serta pembagian harta gono-gini.

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup hukum positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karna terjadinya perselisihan yang menimbulkan percekcoakan yang sulit untuk dihentikan, atau karna tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.¹⁶

2) Dampak Perceraian

¹⁵Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai* (Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2007), h. 17.

¹⁶Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 2.

Dalam Al-Qur'an meminta kepada suami yang ditangganya diberi wewenang untuk menceraikan istrinya, namun berfikirilah sebelum engkau menceraikan istrimu karena dalam QS An-Nisa/4:19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.¹⁷

Penjelasan dari ayat tersebut Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al Qurazdy, dia berkata ,” Dulu menurut kebiasaan Arab, seseorang yang meninggal kemudian meninggalkan seorang istri, anaknya lebih berhak untuk menikahinya. Namun, jika tidak mau, dia juga berhak untuk menikahkannya kepada orang yang dia kehendaki. Seperti ketika Abu Qais bin Al Aslat meninggal, anak laki-laknya mewarisi pernikahan istrinya, tetapi tidak mewarisi hartanya sedikitpun. Lalu, turunlah ayat ini,” (Lubabun Nuqul: 55).

Sejumlah dampak yang timbul akibat eksekusi perceraian adalah sebagai berikut:

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2002), h. 77.

1. Terhadap suami maupun istri, hubungan ikatan perkawinan menjadi putus.
2. Terhadap anak, adanya penjatuhan hak asuh anak.
3. Terhadap harta benda, harta bersama dibagi rata, terkecuali harta bawaan dan perolehan, selama tidak diatur lain dalam perjanjian, dan di luar penentuan kewajiban nafkah pria untuk mantan istri dan anak.¹⁸

Menurut KUHPerdara (BW) putusnya perkawinan dipakai istilah pembubaran perkawinan (*otbinding des huwelijks*) yang diatur dalam tiga bagian, yaitu tentang pembubaran perkawinan pada umumnya dalam Pasal 199, tentang pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan ranjang (Pasal 200-206(b)), tentang perceraian perkawinan (Pasal 207-232(a)) dan yang tidak dikenal dalam hukum adat atau hukum agama Islam walaupun kenyataannya juga terjadi pisah meja dan ranjang (Pasal 233-249).¹⁹

Pasal 199 BW menyebutkan bahwa perkawinan itu terputus karena :

- a) Oleh karena meninggal dunia
- b) Oleh karena keadaan tidak hadirnya salah seorang suami istri selama sepuluh tahun dan diikuti dengan perkawinan baru sesudah itu oleh istri atau suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab delapan belas.

¹⁸Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Mandar Maju, 2002), h. 71.

¹⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta Timur: Mandar Maju, 2007), h. 149.

- c) Oleh karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur (perceraian gantung) dan pendaftaran putusnya perkawinan itu dalam register catatan sipil.
- d) Oleh karena perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ketiga bab ini.

Selanjutnya dikatakan jika suami dan istri pisah meja dan ranjang, baik karena salah satu dari alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 233 dalam UU Perkawinan, maupun atas permohonan kedua belah pihak, dan perpisahan itu tetap berlangsung selama lima tahun penuh tanpa perdamaian antara kedua pihak, maka mereka masing-masing bebas untuk menghadapkan pihak lain ke Pengadilan dan menuntut agar perkawinan mereka dibubarkan (Pasal 200). Tuntutan itu harus segera ditolak bila pihak tergugat, setelah tiga kali dari bulan ke bulan dipanggil ke pengadilan tidak muncul-muncul atau datang dengan mengadakan perlawanan terhadap tuntutan itu atau menyatakan bersedia untuk berdamai dengan pihak lawan (Pasal 201).²⁰

Gugatan perceraian perkawinan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya si suami mempunyai tempat tinggal pokok pada waktu mengajukan permohonan termaksud dalam Pasal 831 Reglemen Acara Perdata atau tempat tinggal mengajukan surat permohonan tersebut di atas si suami tidak mempunyai tempat tinggal pokok atau tempat tinggal sesungguhnya di Indonesia, maka gugatan itu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kediaman istri yang sebenarnya (Pasal 207) perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama (Pasal 208).

²⁰Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 112.

BW berlaku bagi orang Eropa dan Cina sedangkan HOCI berlaku bagi orang Indonesia Asli Kristen Jawa, Minahasa, dan Ambon. Bagi orang-orang yang beragama Kristen yang berada di luar daerah-daerah tersebut berlaku ketentuan-ketentuan asli dari agama mereka sendiri.

Sebenarnya HOCI adalah kombinasi antara BW dan hukum adat karena syarat-syarat perkawinan banyak persamaan antara HOCI dengan BW dengan perlunakan sana-sini, sedang mengenai harta perkawinan adalah Hukum Adat, yakni mengikuti prinsip pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan. Satu hal yang oleh umum dianggap sebagai salah satu sendi dari Agama Kristen ialah hal monogami, yaitu ketentuan bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan mempunyai istri lebih dari seorang. Sistem monogami ini telah dianut oleh BW (Pasal 27 BW) dan HOCI (Pasal 2 S 1993 Nomor 74).

Menurut Pasal 51 S. 1933 Nomor 74 (HOCI) menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut Staatsblad ini adalah putus karena :

1. Oleh karena meninggal dunia
2. Oleh karena suami atau istri meninggalkan tempat kediamannya selama dua tahun tanpa adanya kabar tentang hidup atau matinya dan bersambung oleh suatu perkawinan baru oleh suami atau istri yang ditinggalkan setelah mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri di tempat kediaman dari suami atau istri yang meninggalkan tempat kediaman itu, setelah mendengar keterangan jika mungkin dari Kepala Desanya, dan lagi sekedar dianggap perlu oleh Pengadilan Negeri harus dilakukan pemanggilan dengan perantaraan apa saja terhadap yang bepergian itu. Kalau satu sama lain ini terjadi, maka Pengadilan Negeri baru akan memberi izin untuk perkawinan yang baru itu, apabila memang ternyata tidak masuk kabar tentang masih hidupnya orang yang bepergian itu.

Kalangan gereja tidak membenarkan adanya perceraian perkawinan. Agama Kristen Katholik sendiri sama sekali tidak memungkinkan perceraian perkawinan, sedang Agama Kristen Protestan mengenal adanya perceraian akan tetapi dengan alasan zina, sedang alasan lain tidak diperebolehkan. Tetapi orang-orang Indonesia yang beragama Protestan biasanya mengakui beberapa perkara yang berat sebagai alasan-alasan buat perceraian : zina (oleh laki-laki dan oleh perempuan), penganiayaan berat, peninggalan dengan niat jahat, terkadang-kadang juga kemajiran.

Walaupun agama Kristen-Katholik sama sekali tidak memungkinkan perceraian perkawinan dan hanya kematianlah yang dapat memutuskan perkawinan, namun di Indonesia dan di lain-lain negara juga, perihal perkawinan diantara orang-orang Kristen pada umumnya dianut suatu prinsip bahwa suatu perkawinan oleh Undang-undang dipandang hanya selaku suatu perhubungan perdata belaka antara suami dan istri, artinya terlepas dari pada peraturan agama si suami dan istri. Hal ini bisa kita jumpai dalam Pasal 26 BW dan Pasal 1 S. 1993 Nomor 74 (HOCI). Karena itu peraturan dari BW dan HOCI yang memungkinkan perceraian perkawinan (*echtsheiding*) berlaku juga bagi orang-orang yang beragama Kristen-Katholik. Bandingkan dengan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.²¹

Menurut Hukum Adat, perkawinan itu termasuk urusan keluarga dan kerabat. Walaupun dalam pelaksanaannya pribadi yang bersangkutan yang menentukan untuk berlangsung terus atau terputusnya suatu perkawinan, karena berkumpulnya dua orang untuk pergaulan suami istri adalah urusan yang bersifat

²¹Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1981), h. 86.

perseorangan. Karena itu perkawinan menurut hukum adat mempunyai berbagai fungsi :

1. Untuk memungkinkan pertumbuhan secara tertib daripada masyarakat, kerabat kearah angkatannya.
2. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu meneruskan masyarakat sanak saudaranya.
3. Meneruskan bagian clan, suku, dan keluarga.
4. Mempertahankan masyarakat dusun dan wilayah sebagai kesatuan-kesatuan masyarakat.
5. Mempertahankan hubungan golongan-golongan sanak saudara satu sama lain.
6. Meneruskan hubungan yang timbal balik.

Fungsi-fungsi tersebut berpengaruh pula atas alasan-alasan dan kemungkinan untuk perceraian.

Undang-undang perkawinan yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, mengadakan klasifikasi perceraian sebagai berikut :

- 1) Kematian
- 2) Perceraian;
- 3) Cerai – Thalaq
- 4) Cerai – Gugatan.
- 5) Keputusan Pengadilan.

Penjelasan umum tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa, sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka undang-undang ini disatu pihak harus dapat

mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedang dilain pihak harus dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Karena itu pula undang-undang ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan, sehingga tidak ada perkawinan di luar masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disamping tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Karena tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka konsekuensinya tidak ada pula perceraian di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi jelaslah bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini yang pelaksanaannya secara efektif mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berlaku pula hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagai hukum positif untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk perceraian. Karena itu bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri dan tidak pula kemungkinan untuk cerai dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen, bagi orang Hindu atau Budha, Hilman.

Karena itu Undang-undang ini telah menentukan beberapa prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berlandaskan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Prinsip-prinsip dan asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu perkawinan bukanlah hanya sekedar hubungan perdata semata-mata tetapi mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan mempunyai unsur lahir (jasmani) dan batin (rohani).

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, disamping menurut perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (1) (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Dengan demikian hukum agama tentang perkawinan menjadi hukum positif.

Perkawinan berasaskan monogami dan bagi mereka yang karena hukum dan agamanya membolehkan beristri lebih dari seorang (poligami), menunjukkan poligami itu di bawah pengawasan Hakim. Pasal 3,4, dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dimana calon suami istri itu ditentukan batas umur untuk kawin, yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, untuk mencegah kawin di bawah umur Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974, demi generasi selanjutnya.²²

Perkawinan dimana menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Pasal 39 dan 40 UU Nomor 1 Tahun 1974.²³ Perkawinan dimana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, dimana

²²Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Gama Press, 2010), h. 3.

²³Republik Indonesia, *Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Gama Press, 2010), h. 11.

suami sebagai kepala rumah tangga dalam pergaulan masyarakat, dimana suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974.²⁴

Penentuan pengadilan berdasarkan keagamaan seseorang untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan termasuk perceraian, yakni : Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi mereka yang beragama bukan Islam. Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Prinsip dan asas-asas yang dianut oleh undang-undang ini sebagaimana tersebut di atas adalah sejalan dengan prinsip dan asas-asas yang dianut oleh Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadist Rasul.

3) *Jenis-Jenis Perceraian*

Perceraian berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 2, yaitu :

a) Cerai hidup

Perceraian adalah berpisahnya pasangan suami istri atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan yang diakui oleh hukum atau legal. Emery (1999) mendefinisikan perceraian hidup adalah berpisahnya pasangan suami istri atau berakhirnya perkawinan krena tidak tercapainya kata kesepakatan mengenai masalah hidup.

²⁴Republik Indonesia, *Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Gama Press, 2010), h. 19.

Perceraian dilakukan karena tidak ada lagi jalan lain yang ditempuh untuk menyelamatkan perkawinan mereka.

b) Cerai mati

Cerai mati merupakan meninggalnya salah satu dari pasangan hidup dan sebagai pihak yang ditinggal harus sendiri dalam menjalani kehidupannya (Emery, 1999). Salah satu pengalaman hidup yang paling menyakitkan yang mungkin dihadapi oleh seseorang adalah meninggalnya pasangan hidup yang dicintai.

Benaïm (*dalam* Ulfasari, 2006) mengatakan bahwa meninggalnya pasangan hidup bagi seorang wanita akan terasa lebih menyakitkan dibanding laki-laki, karena itu seorang laki-laki yang ditinggal mati pasangan hidupnya cenderung lebih cepat dapat melupakan atau menyelesaikan masalah tersebut dan memilih untuk menikah kembali. Sebaliknya bagi para wanita yang ditinggal mati suaminya biasanya akan memiliki masalah yang lebih kompleks. Mereka harus memikirkan sumber masalah, sumber keuangan bagi kehidupan dan juga untuk anak-anaknya.²⁵

4) Alasan-Alasan Terjadinya Perceraian

Berdasarkan pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, alasan menggugat perceraian sebagai berikut:

²⁵Adib Bahari, *Prosedur Cerai +Pembagian Harta Gono-gini+Hak Asuh Anak* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 39.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁶

5) *Akibat Hukum Perceraian*

Hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh pihak isteri maupun suami setelah terjadi perceraian diatur dalam pasal 41 Undang-undang Perkawinan.²⁷ yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

²⁶Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan* (Surabaya: Artha Perkasa Nusantara, 2003), h.55.

²⁷Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Tim Permata Press, 2003), h. 90.

- b. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungjawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.²⁸

6) *Tata Cara Perceraian Dalam Undang-undang Perkawinan*

Berdasarkan pasal 39-41 Undang-undang Perkawinan dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14-36, Perceraian ada 2 macam yaitu:

1. Cerai talak

Suami yang mentalak istrinya sebagaimana didalam QS Al-Baqarah/1:229.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya :

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu

²⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 77.

melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.²⁹

Penjelasan dari ayat tersebut Tirmizi, Hakim dan lain-lain mengetengahkan dari Aisyah, katanya, “Seorang laki-laki dapat menceraikan istrinya seberapa dikhendakinya untuk menceraikannya. Dia akan tetap menjadi istrinya jika ia rujuk selama berada dalam idah, walau diceraikannya lebih dari seratus kali pun, hingga seorang laki-laki berkuasa mengatakan kepada istrinya, “Demi Allah, saya tidak akan menceraikanmu hingga kamu lepas dari tangan saya, dan tak akan menceraikanmu hingga kamu lepas dari tangan saya, dan tak akan pula memberimu tempat tinggal untuk selama-lamanya.” Jawab wanita itu, jawab wanita itu, “Bagaimana caranya?” Jawabnya, “ Saya jatuhkan talak kepadamu.”Maka saya sampaikan kepada hal itu kepada Nabi saw. Lalu beliau terdiam, sampai turun ayat, “ Talak itu dua kali dan setelah itu boleh rujuk secara yang makruf atau baik-baik dan menceraikan dengan ihsan atau secara baik-baik pula.”

Tata cara tentang seorang suami yang hendak mentalak isterinya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 14-18 yang pada dasarnya dalah sebagai berikut:

- 1) Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2002), h. 49.

Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Di sini ditegaskan bahwa pemberitahuan itu harus dilakukan secara tertulis dan yang diajukan oleh suami tersebut bukanlah *surat permohonan* tetapi *surat pemberitahuan*. Setelah terjadi perceraian di muka Pengadilan, maka ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian.

- 2) Setelah pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut, kemudian setelah mempelajarinya, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat itu, Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk dimintai penjelasan.
- 3) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumahtangga, maka pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.
- 4) Sidang pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu di dalam sidang tersebut.

- 5) Kemudian ketua pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, dan surat keterangan tersebut dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- 6) Perceraian terjadi terhitung pada saat terjadi perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Dalam undang-undang peradilan agama nomor 7 Tahun 1989 Bab IV hukum acara paragraf dua tentang cerai talak dijelaskan pada pasal 66-72.³⁰

b. Cerai gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan.

Tatacara perceraian ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perceraian pasal 20-36 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengajuan gugatan.
- 2) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat *tergugat*.
- 3) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat

³⁰Republik Indonesia, *Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), h. 32.

kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman *penggugat*.

- 4) Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat *penggugat*.

5) Pemanggilan

- a) Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan ini dilakukan setiap akan dilakukan persidangan.

- b) Yang melakukan pemanggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama).

- c) Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.

- d) Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media

lain yang ditetapkan oleh Pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

e) Apabila tergugat berdiam di luar negeri pemanggilannya melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

1. Persidangan

a) Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat kediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu.

b) Para pihak yang berpekara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.

c) Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

d) Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

2. Perdamaian

a) Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.

b) Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

c) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

3. Putusan

a) Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.

b) Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.

c) Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedang bagi agama lain terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.³¹

³¹Adib Bahari, *Prosedur Cerai+Pembagian Harta Gono-gini+Hak Asuh Anak* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 44.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak

Sebelum membahas tentang pengertian *Hadhanah* dalam sebuah Hadis menjelaskan tentang pemeliharaan anak yaitu :

Hadis riwayat Abu Hurairah r.a

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة قالت: يا رسول الله, إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إشتهما عليه فقال زوجها : من يخافني في ولدي فقال النبي : هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت (رواه أصحاب السنن)

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a berkata, “aku pernah bersama-sama Nabi Saw lalu datang seorang wanita dan berkata,” Ya Rasullulah Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya dia telah mengambilkan air untukku dari sumur Abu Inabah dan sungguh dia telah berjasa kepadaku” maka datanglah suaminya dan berkata,”siapa yang berani menghalangi aku dengan anakku ini?” Nabi berkata,” ini bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan di antara keduanya yang engkau kehendaki” lalu diambillah tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya” (HR. Ashabus Sunan).³²

1. Definisi Hadhanah (Hak asuh Anak)

Kata *hadhanah* adalah bentuk mashdar dari kata *hadhnu ash-shabiyy*, atau mengasuh atau memelihara anak. Mengasuh (*hadhn*) dalam pengertian ini tidak dimaksudkan dengan menggendongnya dibagian samping dan dada atau lengan.

³²Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzhab, Buku kedua*, Terjemah Afif Muhammad, (Jakarta: Basrie Press, 1994).

Secara terminologis, *hadhanah* adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hukum *hadhanah* inihanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya. Inilah yang dimaksud dengan perwalian (*wilayah*). Sebagaimana dalam QS al-Baqarah/1:233.

وَالْوَالِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُم مَّا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³³

Penjelasan dari ayat tersebut setiap ibu (meskipun ia janda) berkewajiban menyusui anaknya sampai anak itu mencapai usia dua tahun. Tidak mengapa kalau dikurangi dari masa tersebut apabila kedua ibu bapak memandang ada maslahatnya. Demikian pula setiap bapak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik dengan sandang maupun pangan menurut yang semestinya.

Hadhanah menurut bahasa adalah Al-Janbu berarti erat atau dekat. Sedangkan menurut istilah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang dapat membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalannya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.³⁴

Pengertian ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq bahwa hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar belum *mumayyiz* tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik

³³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2002), h. 44.

³⁴Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 224.

jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.³⁵

2. Hak dan Kedudukan Anak Setelah Perceraian Orang Tua

Hak dan kedudukan anak dalam keluarga anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam, atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut, sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak dengan *li'an* (sumpah) bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perziniaannya dan pengadilan atas permintaan pihak berkepentingan memutuskan tentang sah atau tidaknya anak.

Asal-usul seorang anak hanya bisa dibuktikan dengan akta kelahiran autentik oleh pejabat yang berwenang, jika akta autentik tidak ada maka asal-usul anak ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan pembuktian yang memenuhi syarat untuk kemudian dibuatkan akte kelahiran pada instansi pencatat kelahiran.

Terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan, kewarganegaraannya akan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum publik maupun perdata.

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 8* (Bandung: Al-Ma'ruf, 1984), h. 179.

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri (dewasa) adalah 21 tahun, sepanjang ia tidak cacat fisik atau pun mental atau belum kawin. Orangtua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Apabila kedua orang tua anak tidak mampu, pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban orangtuanya. Ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah kepada anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah ayah darinya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya.

Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan adalah ayah dan ibunya, Apabila ibunya bertanggung jawab atas pengasuhan anak dirumah maka ayah bertanggung jawab mencari nafkah untuk anak-anaknya. Seorang ayah yang mampu akan tetapi tidak memberi nafkah kepada anaknya padahal anaknya sedang membutuhkan. Dapat dipaksa oleh hakim atau dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya.

Seorang ayah yang menunggakkan nafkah anaknya tetapi ternyata anaknya tidak sedang membutuhkan nafkah dari ayahnya maka hak nafkan dianggap gugur, karena si anak dalam memenuhi kebutuhan selama ayahnya menunggak tidak sampai berhutang karena ia mampu membiayai diri sendiri, akan tetapi jika anak tidak mempunyai dana sendiri sehingga untuk

memenuhi kebutuhannya ia harus berhutang maka si ayah dianggap berhutang nafkah yang belum dibayarkan kepada anaknya.³⁶

Di sisi lain, si anak wajib menghormati orang tuanya dan wajib mentaati kehendak dan keinginan yang baik orang tuanya, dan jika anak sudah dewasa ia mengemban kewajiban memelihara orang tua serta karib kerabatnya yang memerlukan bantuan sesuai kemampuannya.

Hak dan kedudukan anak setelah perceraian orang tuanya diantara antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, Seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan lainnya. Peristiwa perceraian apapun alasannya, merupakan malapetaka bagi anak, anak tidak lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin bahkan merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah swt.

Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orangtuanya. Setelah terjadinya perceraian, Pengadilan memutuskan siapa di antara ayah dan ibu yang berhak menjalankan kuasa orang tua demi kelangsungan pemeliharaan dan pengasuhan anak, tidak jarang terjadi perebutan mengenai hak asuh anak,

³⁶Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Cet II; Jakarta: Kencana, 2004), h. 157.

masing-masing bekas suami istri merasa paling berhak dan layak untuk menjalankan hak asuh.

Meskipun memegang kuasa, orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya kecuali kepentingan anak menghendaki jika orang tuanya melalaikan kewajibannya atau berkelakuan yang sangat buruk. terhadap anak dapat dicabut untuk waktu tertentu, pencabutan kekuasaan orang tua tidak dapat dimintakan ke Pengadilan oleh salah satu orang tua keluarga anak dalam garis lurus keatas, saudara kandung yang telah dewasa atau oleh pejabat yang berwenang, kekuasaan orang tua yang dicabut tidak menghilangkan kewajiban untuk tetap memberi biaya pemeliharaan kepada anak.³⁷

3. *Batas Usia Kedewasaan Anak*

KUHPerdata pasal 330 tentang batas usia kedewasaan anak yaitu kategori belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan lebih dahulu telah kawin. Di sini artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah. Jika belum berusia dua puluh satu tahun penuh tetapi sudah kawin telah dikatakan

³⁷Thalib, *20 Perilaku Durhaka Orangtua terhadap Anak* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996), h. 41.

dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan belum dewasa.³⁸

Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.³⁹

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. dan pasal 50 ayat (1), Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun.⁴⁰

³⁸Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Cet.XVII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991), h. 202.

³⁹Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Tim Permata Press, 2003), h. 4.

⁴⁰Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Tim Permata Press, 2003), h. 110.

Undang-undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.⁴¹

4. Hak Asuh Anak dibawah Umur

Ayah dan ibu adalah orang tua anak-anaknya. Walaupun ayah dan ibu telah bercerai, anak tetap berhak mendapat kasih dan sayang dari keduanya. Ayah tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Anak berhak menjadi ahli waris karena merupakan bagian dari nasab ayah dan ibunya. Anak gadis pun harus dinikahkan oleh ayahnya, bukan oleh ayah tiri.

Bagaimana nasib ibu yang telah menjanda? Ibu yang menjanda akibat diceraikan suaminya maka ia berhak mendapat nafkah dari suami hingga masa iddahnya berakhir (tiga kali haid) serta upah dalam pengasuhan anak baik dalam masa iddah maupun setelahnya hingga anak mencapai fase *tamyiz* (berakal) dan melakukan *takhyir* yang memungkinkan ia untuk memilih ikut ibu atau ayah

Jika anak belum mencapai fase *tamyiz* (berakal), maka ibu tetap berkewajiban mengasuh anaknya. Jika ibu tidak mampu mengasuh anaknya (misalnya karena : kafir/murtad, tidak waras, dan sebab syar'i lainnya yang tidak memungkinkan dia mengasuh dan mendidik anak), maka pengasuhan dapat dilakukan oleh ibunya ibu (nenek dari anak) hingga garis keturunan seterusnya. Jika dari semua yang tergolong mulai dari ibunya ibu hingga garis keturunan

⁴¹Republik Indonesia, *Perlindungan Anak dan Pengadilan Anak* (Jakarta: Trinity, 2007), h. 8.

seterusnya tidak mampu mengasuh maka menjadi kewajiban ayah untuk mengasuh atau mencari pengasuh yang mampu untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

Pengasuh yang dipilih bisa ibunya ayah (nenek anak) hingga garis keturunan seterusnya. Bisa juga perempuan lain yang memang mumpuni dalam mengasuh anak. Adapun syarat pengasuh anak adalah baligh dan berakal, mampu mendidik, terpercaya dan berbudi luhur, Islam, dan tidak bersuami.

Perceraian memang pahit. Akan tetapi perceraian lebih baik dipilih daripada kehidupan rumah tangga menjadi terpuruk sehingga bisa menyebabkan berbagai kemaksiatan. Tugas ayah dan ibu berikutnya adalah menanamkan cinta dan kasih sayang kepada anggota keluarganya agar anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut tidak condong kepada sikap durhaka. Baik kepada ibu, ayah, maupun keduanya. Hal ini karena ayah dan ibu adalah orang tua dari anak.⁴²

Dalam perkawinan sendiri memang tidak terdapat definisi mengenai hak asuh tersebut, namun jika kita melihat Pasal 1 angka 11 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan anak), terdapat istilah Kuasa Asuh yaitu: kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

⁴²Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak* (Jakarta Timur: Al-Mawardi, 2004), h. 113.

Selain itu juga dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Perlindungan Anak terdapat pula istilah hak asuh yaitu anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Seluk beluk Pemberian hak asuh anak.

Sesuai dengan apa yang kami sampaikan di atas tentunya akan timbul suatu pertanyaan, siapakah diantara bapak atau ibu yang paling berhak untuk memperoleh hak asuh atas anak tersebut. Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam Pasal (78 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan Dalam hal terjadi perceraian adalah pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur (5 tahun adalah hak ibunya). Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Ketentuan KHI diatas nampaknya tidak dapat berlaku secara universal, karena hanya akan mengikat bagi mereka yang memeluk agama Islam yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama.

Sedangkan untuk orang-orang yang bukan beragama Islam yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri, karena tidak ada pedoman yang secara tegas mengatur batasan pemberian hak asuh bagi pihak yang menginginkannya, maka hakim dalam menjatuhkan putusannya akan mempertimbangkan antara lain pertama, fakta-fakta yang terungkap

dipersidangan: kedua, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak: serta argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari pihak yang memohonkan hak asuh anak tersebut dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak tersebut.⁴³

⁴³Subekti.R dan Tjirosudibio.R, *Hukum Perdata dengan tambahan UUPA dan Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 212.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Jenis Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dan objek penelitian ini adalah dilakukan di Kabupaten Wajo dengan objek penelitian Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B, untuk memperoleh informasi dan data mengenai hak asuh anak dibawah umur.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum deskriptif yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B Kab. Wajo.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Menurut harfiahnya pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek atau segi hukumnya terutama peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum.

Dengan demikian yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan cara pandang dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi di masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

C. Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Penelitian ini bercorak field research, oleh karena itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Data ini berkenaan dengan nilai kualitas.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data Pustaka melalui Library research yaitu metode yang dilakukan dengan cara membaca beberapa literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian, dalam hal ini bahan-bahan penelitian yang terkait dengan kepustakaan adalah:

1) Sumber data primer

Sumber data primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya, diantaranya adalah :

- a) Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan undang-undang RI nomor 3 tahun 2007 tentang pengadilan anak.

c) Kompilasi Hukum Islam.

2) Sumber data sekunder.

Yaitu data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Al-Qur'an dan Hadist, peraturan perundang-undangan (KHI), buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

3. Metode pengumpulan data

1) Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti mengenai fenomena objek penelitian diikuti dengan pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti, observasi tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain. Dari segi prosesnya observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan (peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati), dan observasi non partisipan (tidak terlibat dan hanya sebagai peneliti independen), dan dari segi instrumentasi yang digunakan maka dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur (dirancang sistematis) dan tidak terstruktur (tidak dipersiapkan secara sistematis). Adapun teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipan dalam artian peneliti hanya

mengamati masyarakat yang sedang menghadiri sidang perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B tanpa mengikuti rangkaian persidangnya.

2) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang “*Open ended*” (wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan saja) dan mengarah pada pedalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B Kab. Wajo guna memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak asuh anak akibat perceraian.

3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti Akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, video dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen adalah merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun

dokumen yang akan diteliti adalah dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan perceraian, seperti buku register perkara, akta cerai/putusan pengadilan, laporan bulanan, dan lain sebagainya.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat tentang bagaimana penyelesaian hak asuh anak yang masih dibawah umur di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B Kab. Wajo. Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah Pedoman Wawancara yaitu Salah satu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh data/informasi tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya hak asuh dibawah umur akibat perceraian di Pengadilan Agama Sengkang, Bagaimana penanganan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perebutan hak asuh anak di Pengadilan Agama Sengkang, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan penelitian ini. Informasi dapat diperoleh dengan wawancara langsung dan wawancara tertulis dengan para hakim dan panitera Pengadilan Agama Sengkang.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang menjabarkan terhadap bahan penelitian, sehingga penulis mendapatkan data dari hasil penelitian yang dilakukan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu semua data yang diperoleh baik yang diperoleh di lapangan maupun yang diperoleh melalui kepustakaan setelah diseleksi dan

disusun kembali kemudian disimpulkan secara sistematis. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data dengan jalan persentase melalui analisis statistik deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B

Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo semula berkantor di Jl. Sultan Hasanuddin No. 15 Sengkang. Mulai tanggal 21 April 2008 pindah ke kantor baru Jl. Beringin I yang telah diresmikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 27 Agustus 2008. Adapun dasar hukum dan sejarah berdirinya adalah sebagai berikut:⁴⁴

a) Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang

Pengadilan Agama Sengkang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Perkembangan berikutnya terjadi perubahan nama serta wilayah hukum dan lokasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958.

b) Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Sengkang

Berdirinya Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo merupakan implementasi dari pasal (1) PP. RI, No.45 Tahun 1957. “Ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.” Peraturan Pemerintah tersebut ditentukan nama-nama tempat di mana akan dibentuk Pengadilan Agama. Hanya saja implementasinya masih terbentur pada pasal (12) Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1957 bahwa “Pelaksanaan dari peraturan

⁴⁴Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Sengkang.

ini diatur oleh Menteri Agama”. Pada tanggal 6 Maret 1958 keluarlah Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat sebagai realisasi dari pasal 12 PP. RI. Nomor 45 Tahun 1957. Dalam Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tersebut ditetapkan bahwa dalam nomor urut 17 akan dibentuk Pengadilan Agama Sengkang. Hanya saja Pengadilan Agama Sengkang belum dapat melaksanakan tugasnya sebagai salah satu badan peradilan yang resmi karena di samping belum mempunyai kantor juga belum ada pegawainya. Pada tahun 1959 diangkat 3 (tiga) orang pegawai Pengadilan Agama Sengkang, namun tetap belum bisa berjalan karena belum adanya pejabat ketua yang ditunjuk sebagai pimpinan. Pada tanggal 1 Juni 1960 Pengadilan Agama Sengkang resmi terbentuk baik dari segi yuridis formil maupun dari segi realitasnya, dan KH. Hamzah Badawi diangkat sebagai panitera merangkap Pejabat Ketua berdasarkan SK. Menteri Agama No: C/Tim-17/1396 tanggal 3 Maret 1960, sebagai pindahan dari Pegawai Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo.⁴⁵

1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang terdiri dari 14 kecamatan yang meliputi 175 kelurahan dan desa, sebagai berikut:

⁴⁵Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Sengkang.

NO.	KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/DESA
1	Sabbangparu	Kota Baru	15
2	Tempe	Siengkang	16
3	Pammana	Maroanging	15
4	Bola	Solo	10
5	Takkalalla	Peneki	13
6	Sajoanging	Jalang	9
7	Penrang	Doping Baru	10
8	Majauleng	Paria	18
9	Tanasitolo	Tancung	19
10	Belawa	Menge	9
11	Maniangpajo	Anabanua	8
12	Gilireng	Gilireng	9
13	Keera	Keera	10
14	Pitumpanua	Siwa	14



Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo, seperti halnya Pengadilan Agama lainnya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah. Dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama Sengkang menangani beberapa jenis perkara yaitu; izin poligami, izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri, cerai talak, cerai

gugat, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, penetapan ahli waris, pengangkatan anak, nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu, Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami. Pencabutan orang lain sebagai wali oleh pengadilan, ganti rugi terhadap wali, asal-usul anak, penolakan kawin campuran, isbath nikah, wali adhal, dan pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang RI No.1 tahun 1974.⁴⁶

B. Deskripsi Perkara

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai proses penyelesaian hak asuh anak dimulai dengan deskripsi perkara yaitu :

Cerai Talak Nomor 131/Pdt.G/2006/PA.Skg.

Perkara ini merupakan perkara cerai talak dimana Permohon mengajukan surat dalam perkara cerai talak pada ketua Pengadilan Agama Sengkang kelas I B pada tanggal 16 maret 2006. Pemohon telah menikah dengan termohon sejak tanggal 17 Oktober 2003 dan selama pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 1 orang anak.

Adapun kronologis persoalan sebagai berikut:

Ade Riana bin H.T.B Sujana, umur 28 tahun, pekerjaan TNI AD, beralamat di Toboko kelurahan Ballere, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo,

Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat

Dengan ini mengajukan “Permohonan Cerai Talak” terhadap istri Pemohon

⁴⁶Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Sengkang.

Rinny Fitri binti Bains, Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Longka kelurahan Inello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat

Adapun alasan dan dalil gugatan penggugat sebagai berikut:

Penggugat dan tergugat dahulu adalah suami istri namun telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 26 mei 2006.

1. Bahwa dari pernikahan penggugat dengan tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Afifah Aliyyah Humairah (8 tahun).
2. Bahwa sejak Afifah Aliyyah Humairah (8 tahun) tergugatlah yang merawatnya.
3. Bahwa pada bulan januari 2006 penggugat berupaya untuk ikut merawat Afifah Aliyyah Humairah (8 tahun) yang berada dalam asuhan tergugat namun tergugat selalu menyembunyikan Afifah Aliyyah Humairah.
4. Bahwa penggugat beserta dengan keluarga telah berusaha untuk meminta agar Afifah Aliyyah Humairah di asuh secara bergantian oleh penggugat dan tergugat namun kebencian dan rasa sakit tergugat terhadap penggugat mengakibatkan tergugat tidak mengizinkan penggugat untuk merawat Afifah Aliyyah Humairah.
5. Bahwa perbuatan tergugat yang tetap bersikeras menyembunyikan Afifah Aliyyah Humairah menyebabkan penggugat geram karena terpisah dengan anaknya.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka penggugat memohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

Mengabulkan gugatan Penggugat.

Menetapkan hak asuh Afifah Aliyyah Humairah jatuh pada penggugat.

Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hak Asuh Anak Nomor 51/Pdt.G/2015/PA Skg.

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara hak asuh anak dalam perkara hak asuh anak antara:

Lia Santi binti H. Alias Side, S.Sos S.H., M.H., umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jalan Andi Macca Amirullah, Kelurahan Teddaopu, kecamatan Tempe, Kabupaten wajo dalam hal ini diwakili kuasanya, Nurdin andi Mude, S.H Bakri Remmang, S.H.Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Bhakti Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 2/SK/PA.SKG/2015 tanggal 5 Januari 2015, Selanjutnya salam hal ini disebut sebagai Penggugat;

Andi Armawan, S.sos bin Drs. Andi Aminuddin, Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jalan Datuk Sulaeman Nomor 3 Sengkang, Kelurahan Sengkang, Kecamatan

Tempe, Kabupaten wajo, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Abidin Habe, S.H, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Lembu Kompleks perumahan BTN Permatasari Blok G/3 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di kepanitaraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 28/SK/PA.SKG/2015 tanggal 2 Maret 2015, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama Sengkang telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan.

Adapun alasan dan dalil gugatan penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya Tanggal 7 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepanitreaan Pengadilan Agama Sengkang dengan register nomor 51/Pdt.G/2015/ PA Skg telah mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan uraian sebagai berikut;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah suami istri sah, namun telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 433/Pdt.G/2014/PA .SKG tanggal 22 Juli 2014.
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai Seorang anak perempuan bernama Andi Amarlia Atifa Al-Zena, (menurut kabar Tergugat telah mengganti namanya menjadi Andi Erlyta Al-Zena tanpa persetujuan Penggugat) umur 2 tahun 3 bulan (lahir 10 oktober 2012 dan dalam saat ini dalam kekuasaan tergugat).
4. Bahwa permasalahan muncul ketika 7 Agustus 2014, Penggugat ke Pare-pare dengan membawa anaknya, namun tergugat menemui penggugat di Pare-pare, lalu

memaksa Penggugat kembali ke Sengkang dan tergugat berjanji akan menyewakan rumah kost kepada penggugat agar lebih mudah menemui anaknya, namun setelah tiba di Sengkang, justru Tergugat membawa Penggugat bersama anaknya kerumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang tidak mengizinkan penggugat untuk mengambil Andi Erlyta Al-Zena, bahkan untuk bertemu dengan anaknya pun sangat sulit, walaupun dipertemukan harus dalam kamar Tergugat, padahal Andi Erlyta Al-Zena masih menyusui sama penggugat.

5. Bahwa penggugat bersama orang tuanya maupun kerabatnya telah melakukan upaya kekeluargaan untuk meminta agar Andi Erlyta Al-Zena dikembalikan ke Penggugat namun pihak Tergugat menolaknya.

6. Bahwa Tergugat memiliki riwayat pengguna narkoba, serta Tergugat memiliki sikap yang emosional yang tinggi dan telah dinyatakan bersalah dan telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang, sehingga sangat dikhawatirkan keadaan mental Andi Erlyta Al-Zena jika dalam penguasaan tergugat.

7. Bahwa perbuatan tergugat yang tidak mau menyerahkan Andi Erlyta Al-Zena membuat Penggugat merasa terpukul dan tertekan batin karena dipisahkan dengan anak satu-satunya merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan perkembangan pertumbuhan Andi Erlyta Al-Zena yang masih menyusui, yang mana anak tersebut harus dalam pemeliharaan ibu kandungnya, sehingga beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verset, banding dan kasasi.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara hak asuh ini diputus sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh Anak terhadap Andi Erlyta Al-Zena jatuh kepada ibu kandungnya.

Menghukum tergugat untuk menyerahkan Andi Erlyta Al-Zena tanpa syarat apapun setelah putusan ini di ucapkan.

Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pemeliharaan anak Nomor 106/Pdt.G/2016/PA Skg

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Pemeliharaan Anak antara :

Hj. Sumarnianti alias Hj. Nani binti Madeaming, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual rempah-rempah, bertempat tinggal di Palaguna, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

Mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat :

Risman bin Dullah, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Rumah Tahanan Polres Bone, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat,

Adapun alasan /dalil-dalil gugatan penggugat sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri namun telah resmi cerai.
- 2) Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 1 anak, yang bernama Suci Mahira (4 tahun) dalam asuhan orang tua Tergugat.
- 3) Bahwa sejak lahir Suci Mahira, Penggugatlah yang memelihara dan merawatnya.
- 4) Bahwa pada bulan Juli 2015, tergugat dating kerumah orang tua Penggugat dan memohon agar bias membawa Suci Mahira kerumahnya dan Penggugat mengizinkan namun setelah anak Suci Mahira tersebut dibawah kekuasaan Tergugat, ia mengancam mau mengambil sepenuhnya dan mengasuhnya dengan mengatakan,” meskipun kau menangis darah, anak Suci Mahira tidak akan kuberikan kepadamu”, hal tersebut membuat Penggugat sedih.
- 5) Bahwa perbuatan Tergugat yang menolak menyerahkan Suci Mahira kepada Penggugat menyebabkan Penggugat merasa sangat terpukul karena berpisah dengan anak dan merugikan pertumbuhan anak karena tidak terawat dengan baik sejak tergugat dipenjara.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b) Menetapkan hak asuh anak Suci Mahira jatuh pada Penggugat;
- c) Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

C. Proses Penyelesaian Hak Asuh Anak akibat Perceraian dari Hasil Putusan Hakim

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Sengkang kelas I B maka proses penyelesaian hak asuh anak yang ditempuh oleh para majelis hakim dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Pengajuan permohonan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) ke Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B dapat diajukan bersama dengan pengajuan permohonan cerai. Hakim yang dalam hal ini terlibat dalam menyelesaikan perkara mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) sudah konsisten dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang bersumber pada hukum Islam. Hakim berpedoman pada pasal 105

Kompilasi Hukum Islam dimana pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapat *hadhanah* dari ibunya.

- b) Alasan yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara *hadhanah* adalah menyangkut kemaslahatan anak. Hakim bertindak sesuai dengan pasal 105 yakni hal pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- c) Dalam hal ini dari ketiga perkara kasus penyelesaian hak asuh anak dan 1 diantaranya kasus cerai talak yang penulis paparkan diatas maka ketiga kasus tersebut dengan ini 2 diantaranya dikabulkan oleh hakim atas gugatan yang di ajukan oleh para pihak Penggugat dengan berbagai pertimbangan dan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan kasus ini. Sementara kasus cerai talak dengan nomor perkara 131/Pdt.G/2006/PA.Skg dengan ini perkaranya tidak dikabulkan oleh majelis mengingat alasan yang dipaparkan oleh Penggugat tidak memiliki alasan penguat untuk meyakinkan majelis.

D. Penanganan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perebutan Hak Asuh Anak

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penanganan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perebutan hak asuh anak di Pengadilan Agama Sengkang kelas I B Kabupaten Wajo dapat dilihat dari hasil wawancara tertulis dan lisan dengan informan, mengenai perebutan hak asuh anak. Berikut ini adalah

pertanyaan dan jawaban dari informan tentang perebutan hak asuh dibawah umur akibat perceraian di pengadilan Agama Sengkang.

Pertanyaan : Bagaimana penanganan hakim di pengadilan Agama Sengkang dalam menyelesaikan sengketa perebutan hak asuh anak?

Jawaban informan dari Hasil wawancara lisan mengenai pengaruh penyelesaian sengketa perebutan hak asuh anak di Pengadilan Agama Sengkang, dapat dilihat pada jawaban informan berikut ini :

a. Informan 1 (Dra. Hj. Hasmiati D, M.H)

Berusaha untuk mendamaikan para pihak sebisa mungkin karena setelah adanya perceraian diantara keduanya kecil kemungkinan keduanya bisa akur seperti semula dan kemudian melakukan perebutan hak asuh anak maka otomatis kedua belah pihak yang bersengketa akan menyimpan dendam, maka dari itu majelis yang bersangkutan dalam menangani perkara tersebut diharapkan untuk lebih tegas dalam menangani kasus tersebut.⁴⁷

b. Informan 2 (Drs. Muh. Arsyad. S.Ag)

Menurut informan 2 dalam menyelesaikan perkara sengketa hak asuh anak maka kita harus mempertimbangkan hukum islam yang berlaku apakah benar sang ibu tidak melakukan perbuatan yang menyimpang sehingga mengakibatkan si anak tidak ingin di asuh oleh ibunya dan apabila memang benar sang ibu memiliki sifat yang bertentangan dengan hukum yang berlaku

⁴⁷Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Hasmiati D, M.H. Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 9 Desember 2016.

maka kita para hakim yang bersangkutan menyelesaikan perkara tersebut harus berpedoman terhadap hukum yang berlaku.⁴⁸

c. Informan 3 (Dra. Hj. Nikma, MH.)

Menurut informan 3 dalam hal perkara sengketa hak asuh anak penanganan yang harus dilakukan oleh hakim yang bersangkutan dalam menyelesaikan perkara tersebut maka harus teliti dan bijak dalam hal menyikapi keterangan yang dipaparkan oleh para pihak karena ke egoisan, yang mana keduanya sama-sama ingin menguasai anak yang menjadi sengketa tersebut maka dari itu hakim setidaknya berpedoman kepada hukum islam yang berlaku.⁴⁹

Dari ketiga penjelasan informan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa penanganan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa karena keduanya bersikeras ingin menguasai anak yang tergolong masih di bawah umur, maka dari itu hakim yang terlibat dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak tersebut haruslah teliti dan bijak dalam penyelesaian sengketa mengenai hak asuh anak karena hakim akan terkendala pada saat pembuktian dan eksekusi. Pembuktian merupakan permasalahan yang cukup berat ketika menyelesaikan sengketa mengenai hak asuh anak (*hadhanah*).

⁴⁸Hasil wawancara dengan Drs. Muh. Arsyad. S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 9 Desember 2016.

⁴⁹Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Nikma, MH. Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 5 Desember 2016.

E. Analisis tentang putusan hakim mengenai hak asuh anak.

Hak hadhanah anak di bawah umur 12 tahun (belum mumayyis) adalah hak ibunya sepanjang memenuhi syarat. Apabila ibunya meninggal dunia, hak hadhanah beralih menjadi hak wanita dari garis lurus ke atas dari ibu, dan diurutan selanjutnya adalah hak ayahnya. Bagi anak yang berusia di atas 12 tahun, hak hadhanah berdasarkan pilihan si anak. Anak merupakan sumber daya manusia, tunas bangsa dan sebagai generasi penerus cita-cita dan perjuangan suatu bangsa. Itulah sebabnya, anak memegang peranan strategi dalam keberlangsungan dan eksistensi suatu bangsa, sehingga sepatutnya apabila anak mendapat perhatian yang cukup dalam upaya memberikan perlindungan menyeluruh agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik sebagai hak asasi manusia yang melekat pada dirinya. Anak membutuhkan perhatian penuh dari orang tua (bapak ibunya) pada masa kanak-kanaknya karena mereka belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Anak memerlukan cinta dan kasih sayang kedua orang tuanya sebagaimana ia memerlukan makanan. Jiwa anak-anak sangat lembut dan mudah terpengaruh. Anak adalah miniatur orang dewasa yang belum memiliki jati diri dan identitas diri. Olehnya itu, cinta dan kasih sayang kedua orang tuanya sangat berpengaruh pada perkembangannya menuju manusia dewasa yang seutuhnya, hak hadhanah menjadi hak bersama ayah dan ibu agar anak terutama usia di bawah 12 tahun mendapat kasih sayang seutuhnya dari ayah dan ibunya.

Majelis memutuskan hak asuh anak pasca perceraian merupakan hak bersama penggugat (ayah) dan tergugat (ibu), meskipun waktu hak asuh bagi

tergugat lebih lama (ibu), yakni selama 5 hari dalam sepekan, selebihnya (weekend) hak pengugat (ayah). Putusan majelis hakim dalam perkara itu berbeda dengan putusan hakim pada umumnya yang mendasarkan hak hadhanah pada pasal 105 huruf (a) Jo. pasal 156 INPRES Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur dua belas tahun adalah hak ibunya dan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukan ibunya digantikan oleh ayah tersebut”

Meskipun berbeda dengan putusan hakim pada umumnya, namun secara kasuistik putusan hakim tersebut sangat tepat dengan dasar demi kepentingan perlindungan anak semata agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak yang baik. Dalam pengertian apabila terjadi perbendaan pendapat atau rebutan hak Hadhanah anak, yang harus dikedepankan adalah kepentingan perlindungan anak. Selain itu, apabila hak hadhanah ditetapkan hanya kepada tergugat selaku ibu dari anak dalam perkara tersebut, penggugat selaku ayah dari anak itu tidak mendapat akses untuk bertemu dengan anaknya. Alasan-alasan lain yang menjadi dasar putusan tersebut adalah:

Perlindungan anak secara komprehensif. Bahwa anak dalam perkara tersebut masih berusia di bawah 2 tahun. Anak seusia itu sangat memerlukan perlindungan menyeluruh, baik dari segi fisik maupun psikis. Anak membutuhkan perhatian penuh dari orang tua (bapak ibunya) pada masa seperti itu karena mereka belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri walau dapat dilakukan oleh tergugat (ibunya), namun anak seusia itu memerlukan cinta dan

kasih sayang kedua orang tuanya sebagaimana ia memerlukan makanan. Jiwa anak-anak sangat lembut dan mudah terpengaruh. Anak adalah miniatur orang dewasa yang belum memiliki jati diri dan identitas diri. Olehnya itu, cinta dan kasih sayang kedua orang tuanya sangat berpengaruh pada perkembangannya menuju manusia dewasa yang seutuhnya. Anak memerlukan refleksi cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya dalam tindakan nyata. Anak dibelai dalam pangkuan kedua orang tuanya, ditatap, dipeluk dan dicium. Sebaliknya, hati yang kosong dari rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak-anak, pertanda hati tersebut kasar dan keras. Perlakuan dari hati yang kasar hanya akan menyebabkan anak-anak tumbuh dalam kubangan kebodohan dan kemalangan, karena memang sudah menjadi tabiat anak-anak sejak dilahirkan selalu membutuhkan bimbingan, arahan, perhatian dan asuhan.

Di samping itu, perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.

- 1) Dalam Perkara Nomor 131/Pdt.G/2006/PA.Skg. Yang mana pada kasus tersebut Penggugat sebagai ayah merasa sangat kecewa atas perbuatan Tergugat selaku ibu yang melarang ayahnya untuk bertemu dengan anaknya dan selalu menyembunyikan anaknya pasca bercerai maka dari itu Penggugat selaku ayah memohon kepada majelis hakim agar kiranya hak asuh anak jatuh ketangannya dengan alasan Tergugat sering didapati menelantarkan anaknya karena Tergugat lebih memilih untuk berkarir

yakni bernyanyi dalam setiap kesempatan menurut penuturan kerabat Penggugat. Dengan ini hakim menganalisis bahwa alasan Penggugat tidak sepenuhnya dikabulkan oleh majelis hakim dengan berbagai pertimbangan karena alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat yang mana dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang artinya sudah menjadi hak Tergugat untuk bekerja dan tidak serta merta menghilangkan kewajibannya untuk mengasuh anaknya yang masih dibawah umur. Alasan pekerjaan bukan hal yang dengan mudah menghilangkan kewajiban ibu untuk mengasuh anaknya. Dari hasil putusan hakim tersebut telah di jelaskan bahwa tugas seorang hakim yang harus jeli dalam mengambil keputusan demi kepentingan anak.

- 2) Dalam Perkara Nomor 51/Pdt.G/2015/PA Skg. Dalam kasus ini Penggugat sebagai ibu menginginkan anaknya kembali dalam pengasuhannya dengan alasan Tergugat yang mengambil paksa buah hatinya dengan cara ibu Tergugat dan Tergugat tidak mengizinkan penggugat untuk bertemu dengan anaknya. Dan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum yang mana sang anak masih menyusui kepada Penggugat dan Tergugat memiliki riwayat pengguna narkoba dan telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengkang, Nomor 102/Pid.B/2014/PN.SKG tanggal 10 Juni 2014, sehingga pengggugat sangat mengkhawatirkan keadaan mental anak apabila berada dalam penguasaan Tergugat. Maka dari itu majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan

Penggugat seluruhnya dengan melihat berbagai alasan yang menguatkan Penggugat.

- 3) Dalam Perkara Nomor 106/Pdt.G/2016/PA Skg. Dalam kasus tersebut, anak tidak diperkenankan bertemu dan dipertemukan dengan ibunya pasca perceraian ayah ibunya, sehingga anak itu tidak mendapatkan refleksi kasih sayang dari penggugat (ibunya). Pada kasus ini, upaya pertemuan ibu dan anak mendapat hambatan dari pihak tergugat, bahkan terjadi permasalahan yang menyebabkan tergugat harus mendekan dalam tahanan. Kondisi seperti ini apabila dibiarkan berlanjut dan apabila secara hukum penggugat selaku ibunya tidak diberi hak untuk bertemu dengan anaknya, penggugat sangat sulit mendapatkan akses pertemuan yang nyaman bagi si anak, dan hal itu merupakan salah satu indikator menjadikan anak tumbuh menjadi anak dalam kebimbangan. Hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya untuk kepentingan kemaslahatan dan kesejahteraan anak secara hukum terlindungi oleh peraturan perundang-undangan. majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya. Dengan berbagai pertimbangan maka hakim yang diantaranya Tergugat tidak pernah hadir

dalam persidangan dan Penggugat bermaksud untuk merawat anaknya karena Tergugat mendekam dalam penjara dan orang tua Tergugat yang merawat anaknya tidak dapat diharapkan karena pekerjaannya sebagai penagih restribusi di pasar yang tentunya tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk merawat anaknya yang masih bermur 4 tahun maka dari itu majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dengan memperhatikan berbagai pertimbangan hukum. Dalam hasil putusan kasus tersebut hakim berpendapat bahwa kasus tergugat yang mendekam di penjara karena kedapatan mengkonsumsi narkoba dapat merusak mental sang anak mengingat sang anak tergolong dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari sang ibu selaku Penggugat dalam perkara ini.

Setelah di uraikannya perkara tersebut diatas maka dari itu penulis menganalisis bahwa tepat atau tidaknya suatu pertimbangan hakim itu kembali pada asas dibuatnya putusan. Putusan yang baik harus memuat alasan dan dasar putusan. Putusan yang baik harus memuat alasan dan dasar putusan. Artinya itu putusan harus di buat secara sistematis dalam bentuk pertimbangan yang harus di pertanggungjawabkan secara hukum. Maka dari itu, pertimbangan hakim tersebut, harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dapat dijadikan dasar mengadili.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian hak asuh anak dalam hal ini hakim yang terlibat dalam menyelesaikan perkara mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) sudah konsisten dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang bersumber pada hukum Islam. Hakim berpedoman pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dimana pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapat *hadhanah* dari ibunya.
2. Penanganan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa karena keduanya bersikeras ingin menguasai anak yang tergolong masih di bawah umur, maka dari itu hakim yang terlibat dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak tersebut haruslah teliti dan bijak dalam penyelesaian sengketa mengenai hak asuh anak karena hakim akan terkendala pada saat pembuktian dan eksekusi. Pembuktian merupakan permasalahan yang cukup berat ketika menyelesaikan sengketa mengenai hak asuh anak (*hadhanah*).
3. Analisis tentang putusan hakim mengenai hak asuh anak adalah bahwa tepat atau tidaknya suatu pertimbangan hakim itu kembali pada asas

dibuatnya putusan. Putusan yang baik harus memuat alasan dan dasar putusan. Putusan yang baik harus memuat alasan dan dasar putusan. Artinya itu putusan harus di buat secara sistematis dalam bentuk pertimbangan yang harus di pertanggungjawabkan secara hukum. Maka dari itu, pertimbangan hakim tersebut, harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dapat dijadikan dasar mengadili.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan proses dan hasil penelitian lapangan ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dianggap penting dalam proses penyelesaian hak Asuh Anak tersebut, yaitu :

1. Hakim Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B dalam memeriksa perkara permohonan hak asuh anak (hadhanah) harus selalu menjaga keadilan. Hakim juga harus tetap konsisten dalam menegakkan peraturan yang berkaitan dengan hukum islam, keputusan yang dikeluarkan nantinya akan dapat diterima oleh kedua belah pihak karena merasa haknya sudah diperjuangkan.
2. Hakim juga harus selalu tetap teliti dalam memutuskan perkara mengenai hak asuh anak. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Hakim dalam membuat keputusan harus melihat kemaslahatan sang anak.
3. Pembuktian merupakan sarana untuk menemukan kebenaran. Dalam memeriksa bukti harus ada ketelitian hakim, oleh karena itu perlu

adanya sikap yang bijak dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berkaitan mengenai sengketa hak asuh anak (hadhanah). Juru sita selaku pihak yang berwenang untuk melakukan eksekusi juga harus bersikap arif agar pelaksanaan eksekusi terhadap anak berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Rahman, Abdul Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Bahari, Adib. *Prosedur cerai + Harta Gono Gini+ Hak Asuh*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2002.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta Timur: Mandar Maju, 2007.
- Hamid, Zul. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Jawad, Mugniyah Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab, Buku kedua*, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Lasmana, Andi. “Definisi Anak” [http://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/\(26November2015\)](http://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/(26November2015)), dikutip pada 20 Juni 2016.
- Latif, Djamal. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Nasir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Rahmat, Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Gama Pres, 2010.
- . *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta; Gama Press, 2010.
- . *Undang-undang Peradilan Agama nomor 7 tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 1990.
- . *Undang-undang Perkawinan*. Surabaya: Artha Perkasa Nusantara, 2003.
- . *Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang RI nomor 3 tahun 2007 tentang Pengadilan Anak*. Jakarta: Trinity, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz 8*. Bandung: Al-Ma’ruf, 1984.

- Soemijati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibro, R. *Hukum Perdata dengan Tambahan UUPA dan Undang-undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Sudarso. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.
- Thalib, M. *20 Perilaku Durhaka Orangtua terhadap Anak*. Bandung: Irsyad Britus Salam, 1996.
- Yanggo, Husaemah Tahido. *Fiqh Anak*. Jakarta Timur: Al-Mawardi, 2004.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 15194/S.01P/P2T/11/2016
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Sengkang

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syarifah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.9/2339/2016 tanggal 29 November 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : HASMANIAR H
Nomor Pokok : 10100113040
Program Studi : Peradilan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENYELESAIAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS I B "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 05 Desember 2016 s/d 05 Januari 2017

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 30 November 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syarifah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Sultan Alauddin No.63 Makassar Tlp. 0411-864924 Fax 0411-864923
Kampus II Jl. H. Muh Yasin Limpo No.36 Samata Sungguminasa-Gowa Tlp.
0411-4248236

Nomor : SI.1/PP.00.9/ /2016
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) exemplar
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata, 29 November 2016

Kepada

Yth. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

Cq. Kepala UPT P2T BKPM Pro. Sul-Sel.

Di-

Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Hasmaniar.H
NIM : 10100113040
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Peradilan
Semester : VII (tujuh)
Alamat : Perumahan Mutiara Indah Village, Blok HH-20.

Bermaksud untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi yaitu :

**"ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENYELESAIAN HAK ASUH ANAK
AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS I B".**

Dengan dosen pembimbing :

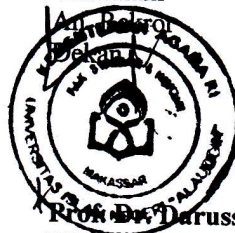
1. Dr. H. Supardin, M.Hi.

2. Dr. Hj. Patimah, M. Ag.

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Makassar terhitung mulai tanggal 5 Desember 2016 s/d 19 Desember 2016.

Demikian permohonan kami, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam



Prok. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:

- Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa



PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Jl. Akasia Sengkang Telp. (0485) 21891 /Fax. (0485) 21848

e-mail : pasengkang@yahoo.co.id

Kabupaten Wajo 90911

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W.20-A3/ 1821 /TL.00/XII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sengkang menerangkan bahwa:

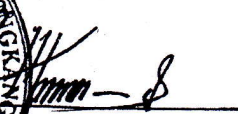
Nama : HASMANIAR H
Nomor Pokok : 10100113040
Program Studi : Peradilan
Pekerjaan : Mahasiswa (S.1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Benar yang bersangkutan telah mengadakan penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Sengkang, dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: “ **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENYELESAIAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS IB**”.

Setelah penulisan skripsi tersebut selesai, diharapkan kepada yang bersangkutan untuk menyeter 1 exemplar ke Perpustakaan Pengadilan Agama Sengkang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 16 Desember 2016


Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH
NRP. 19541231 199203 1 015

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Idris Gani
Pekerjaan/ Jabatan : Hakim
Alamat : Jl. Beringin, kec. Tempe, kab. Wajo.


Benar telah memberikan keterangan kepada

Nama : Hasmaniar H
NIM : 10100113040
Jurusan : Peradilan Agama
Alamat : Samata

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan wawancara berkaitan dengan judul skripsi "Analisis putusan hakim tentang penyelesaian hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Sengkang"

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 29, Maret 2017


Drs. Idris Gani

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hj. Nikma, MH .
Pekerjaan/ Jabatan : Hakim
Alamat : Jl. Akasia , Kelurahan Bulupabbulu
Kec. Tempe , Kab. Wajo

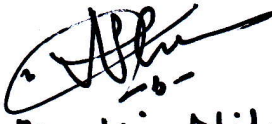
Benar telah memberikan keterangan kepada

Nama : Hasmaniar H
NIM : 10100113040
Jurusan : Peradilan Agama
Alamat : Samata

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan wawancara berkaitan dengan judul skripsi "Analisis putusan hakim tentang penyelesaian hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Sengkang"

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 29 maret 2017


Dra. Hj. Nikma, MH .

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hasmiati D. M. H
Pekerjaan/ Jabatan : Hakim
Alamat : Sempang'e

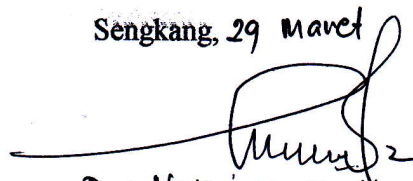
Benar telah memberikan keterangan kepada

Nama : Hasmaniar H
NIM : 10100113040
Jurusan : Peradilan Agama
Alamat : Samata

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan wawancara berkaitan dengan judul skripsi "Analisis putusan hakim tentang penyelesaian hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Sengkang"

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 29 Maret 2017


Dra. Hasmiati D. M. H

PENGESAHAN DRAFT/PROPOSAL SKRIPSI

Draft skripsi yang berjudul, "Analisis Putusan Hakim tentang Penyelesaian Hak Asuh Anak akibat Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang kelas I B" Hasmaniar.H, NIM:10100113040, Mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam seminar draft/proposal Skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 M, bertepatan dengan 3 Safar 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian.

Makassar, 28 November 2016 M
16 Safar 1437 H

Pembimbing I

Dr. H. Supardin, M.Hi.
NIP. 19650302 199403 1 003

Pembimbing II

Dr. Hj. Patimah, Mag.
NIP. 19661124 199403 2 001

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 19621016199031003

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Peradilan

Dr. Supardin, M.Hi.
NIP. 196503021994031003



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I: Jln. Sultan Alauddin No. 63 Makassar, Tlp. (0411) 868720, Fax. 864923
Kampus II: Jln. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa, Tlp. (0411) 841879, Fax. 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 33 TAHUN 2016
T E N T A N G

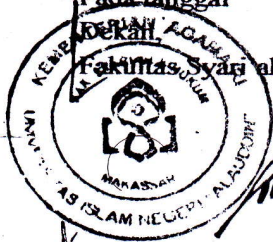
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

- Menimbang :**
- a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
 - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahi tugas sebagai dosen pembimbing Skripsi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah R.I. No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama R.I. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 4. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 5. Keputusan Rektor Nomor 129C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- a. Menunjuk Saudara : 1. Dr. H. Supardin, M.HI.
2. Dr. Hj. Patimah, M.Ag.
sebagai pembimbing mahasiswa:
Nama : Hasmaniar. H
NIM : 10100113040
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Peradilan/HAPK
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG
PENYELESAIAN HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
SENGKANG KELAS I B
 - b. Melaksanakan pembimbingan skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik;
 - c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
 - d. Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 31 Oktober 2016



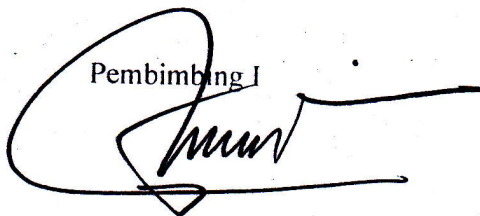
Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 196210161990031003

Tembusan:
Rektor UIN Alauddin Makassar di Makassar (sebagai la
poran).

PENGESAHAN DRAFT/PROPOSAL SKRIPSI

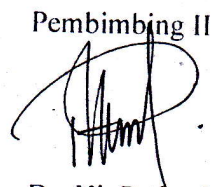
Draft skripsi yang berjudul, "Analisis Putusan Hakim tentang Penyelesaian Hak Asuh Anak akibat Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang kelas I B" Hasmaniar.H, NIM:10100113040, Mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam seminar draft/proposal Skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 M, bertepatan dengan 3 Safar 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian.

Makassar, 28 November 2016 M
16 Safar 1437 H



Pembimbing I

Dr. H. Supardin, M.Hi.
NIP. 19650302 199403 1 003



Pembimbing II

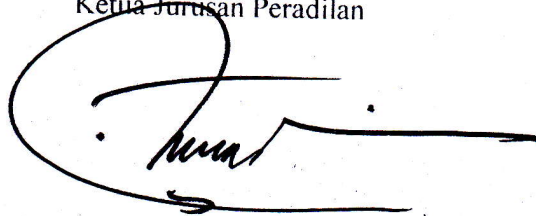
Dr. Hj. Patimah, Mag.
NIP. 19661124 199403 2 001

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 19621016199031003

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Peradilan



Dr. Supardin, M.Hi.
NIP. 196503021994031003

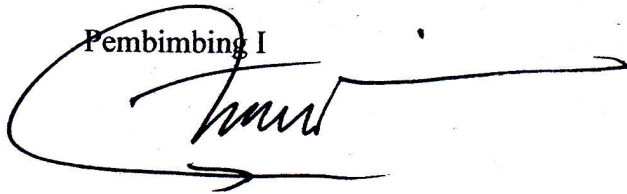
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Hasmaniar. H, NIM: 10100113040, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi yang berjudul: "Analisis Putusan Hakim tentang Penyelesaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan (Seminar Hasil).

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan lebih lanjut.

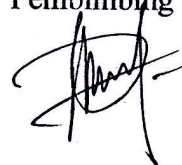
Makassar, 21 Maret 2017 M
24 Jumadil Akhir 1388 H

Pembimbing I



Dr. H. Supardin, M.Hi
NIP. 19650302 1994031 003

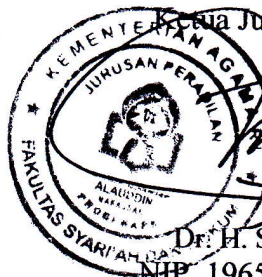
Pembimbing II



Dr. Hj. Patimah, M. Ag.
NIP. 19681027 199403 2 001

Disetujui oleh:

Ketua Jurusan Peradilan



Dr. H. Supardin, M.Hi
NIP. 19650302 1994031 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hasmaniar H

Tempat/Tgl Lahir : Keera, 2 April 1994

NIM : 10100113040

Jurusan : Peradilan Agama

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Mutiara indah Village HH20

Nomer HP : 085394244611

Orang Tua :

Ayah : Hasim

Ibu : Hj. Indo Mare

A. Riwayat Pendidikan :

TK PGRI KEERA

SD Negeri 321 Ballere, Wajo (2001-2007)

SMP Negeri 1 Keera, Wajo (2007-2010)

SMA Negeri 1 Keera (2010-2013)

UIN Alauddin Makassar

(2013-Sekarang)

B. Riwayat Organisasi :

Ikatan Penggigat Peradilan Semu (IPPS)

UIN Alauddin Makassar

(2013-Sekarang)